



Mengapa Manusia Menginginkan Kekuasaan: Hakikat, Patologi, dan Alternatif

Bahasa Indonesia

<https://prompting-query.com/id/books/year-2025/why-people-want-power/>

MENGAPA MANUSIA MENGINGINKAN KEKUASAAN: HAKIKAT, PATOLOGI, DAN ALTERNATIF

Buku lengkap yang menghimpun seluruh bagian

PENDAHULUAN

Paradoks kekuasaan di dunia masa kini

Kekuasaan adalah keadaan yang paling didambakan sekaligus paling dikutuk manusia. Kita mengesalnya, tetapi merendahkan mereka yang telah meraihnya. Kita mengkritik para penguasa, tetapi diam-diam iri pada keleluasaan yang mereka miliki. Kita memimpikan dunia tanpa paksaan, tetapi terus menciptakan bentuk-bentuk kendali yang baru. Paradoks ini meresapi seluruh sejarah manusia dan terasa sangat tajam pada zaman kita.

Abad ke-21 memberi kita peluang yang belum pernah ada untuk membangun organisasi yang setara: internet, blockchain, dan media sosial memungkinkan jutaan orang mengoordinasikan tindakan tanpa kendali terpusat. Namun, pada saat yang sama, kita menyaksikan menguatnya kecenderungan otoriter, munculnya bentuk-bentuk baru totalitarisme digital, serta kendali algoritme atas perilaku. Mengapa ini terjadi?

Penjelasan yang lazim—kepentingan ekonomi, kompleks psikologis, dan tradisi sejarah—terasa belum memadai. Semua itu menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja, tetapi tidak menjawab mengapa manusia terus mendambakannya, bahkan ketika kekuasaan membawa penderitaan bagi penguasa maupun orang-orang di sekitarnya.

Mungkin kita keliru memahami hakikat kekuasaan itu sendiri. Kita melihatnya sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Namun, bagaimana jika kekuasaan bukan sarana, melainkan cara menjalani keberadaan? Bukan alat, melainkan candu? Bukan jalan keluar dari masalah, melainkan pelarian darinya?

Tujuan dan metode kajian

Buku ini merupakan upaya memahami kekuasaan bukan dari sudut ilmu politik atau sosiologi, melainkan melalui filsafat eksistensial. Yang ingin kita pahami bukan susunan sistem politik, melainkan apa yang terjadi pada seseorang ketika ia memperoleh kemampuan untuk mengatur orang lain.

Kita berangkat dari dugaan bahwa keinginan berkuasa sering kali berakar bukan pada alasan rasional, melainkan pada kebutuhan eksistensial: kebutuhan akan makna, kendali, dan perasaan bahwa diri kita berarti. Kekuasaan menjadi cara untuk mengisi kekosongan batin, untuk menciptakan ilusi bahwa keberadaan kita penting.

Namun, paradoksnya, kekuasaan yang seharusnya memberi makna justru sering merampasnya. Ketika memperoleh kendali atas orang lain, seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setelah mencapai puncak, ia mendapati bahwa di sana tidak ada apa-apa.

Kajian kita bertumpu pada beberapa prinsip:

Kejujuran fenomenologis: kita berusaha menggambarkan kekuasaan sebagaimana dialami oleh para penguasa sendiri, bukan sebagaimana seharusnya menurut teori.

Perspektif sejarah: kita menelusuri perkembangan bentuk-bentuk kekuasaan dari zaman kuno hingga sekarang, memperlihatkan bagaimana mekanismenya berubah sementara hakikatnya tetap bertahan.

Analisis kritis: kita tidak menerima begitu saja pembenaran kekuasaan yang lazim, baik yang bersifat keagamaan, sekuler, maupun teknokratis.

Pemikiran alternatif: kita sungguh-sungguh mempertimbangkan kemungkinan adanya masyarakat tanpa bentuk-bentuk kekuasaan tradisional.

Susunan buku

Buku ini terdiri atas empat bagian. Masing-masing mengungkap satu sisi persoalan kekuasaan.

Bagian I. Hakikat kekuasaan menelaah akar biologis, historis, dan psikologis dari keinginan untuk mendominasi. Kita akan menelusuri perkembangan struktur kekuasaan, dari hierarki hewan hingga negara modern, serta melihat bagaimana keadaan sosial membentuk kebutuhan untuk mengendalikan.

Bagian II. Mekanisme kendali mengkaji bagaimana kekuasaan dijalankan dalam praktik. Dari paksaan fisik pada zaman kuno hingga pengaturan berbasis algoritme dewasa ini, kita akan melihat perkembangan teknologi kekuasaan dan pengaruhnya terhadap kesadaran manusia.

Bagian III. Krisis dan patologi membahas sisi gelap kekuasaan: kemampuannya merusak mereka yang menjalankannya maupun mereka yang tunduk kepadanya. Kita akan menelaah hilangnya makna kekuasaan, perubahan kekuasaan menjadi tujuan bagi dirinya sendiri, serta bentuk-bentuk perlawanan dan penolakan.

Bagian IV. Alternatif dan masa depan meninjau jalan-jalan yang mungkin ditempuh untuk melampaui bentuk kekuasaan tradisional, mulai dari komunitas yang setara dan struktur jaringan hingga pemikiran ulang secara mendasar tentang gagasan memerintah itu sendiri.

Buku ini tidak mengaku memiliki jawaban akhir. Tujuannya adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada masa ketika bentuk-bentuk kekuasaan lama mengalami krisis dan yang baru masih mulai terbentuk, kita perlu memahami bukan hanya mekanisme pemerintahan, melainkan juga dorongan terdalam orang-orang yang ingin memerintah.

Mungkin, dengan menyadari alasan sesungguhnya di balik ketertarikan kita pada kekuasaan, kita dapat menemukan cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan eksistensial. Mungkin, dengan memahami sisi patologis dari berbagai bentuk kendali, kita dapat menciptakan alternatif yang lebih manusiawi. Atau mungkin kita hanya akan mengakui dengan jujur bahwa keinginan berkuasa merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia, dan kita harus belajar hidup dengannya.

Buku ini adalah undangan untuk berbincang seperti itu dengan diri kita sendiri.

BAGIAN I. HAKIKAT KEKUASAAN

Bab 1. Akar biologis dan historis

Naluri mendominasi

Saat mengamati sekawanan serigala, kita melihat apa yang disebut para antropolog sebagai “hierarki alami”. Pemimpin kawanan tidak dipilih melalui pemungutan suara demokratis. Ia merebut kedudukannya dengan kekuatan, kecerdikan, atau karisma. Anggota kawanan lainnya bukan hanya tunduk kepadanya, melainkan juga melindungi hierarki itu dari ancaman luar.

Manusia adalah pewaris jutaan tahun evolusi. Naluri mendominasi tertanam dalam diri kita sedalam kebutuhan akan makanan atau berkembangbiakan. Dalam setiap kelompok manusia, dari taman kanak-kanak hingga dewan direksi, hierarki muncul dengan sendirinya. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pengikut. Semua itu berlangsung otomatis, tanpa keputusan yang disadari.

Namun, kekuasaan manusia berbeda dari dominasi hewan dalam satu hal mendasar: kekuasaan itu dapat bertahan tanpa kehadiran fisik sang penguasa. Pejantan alfa harus terus membuktikan dominasinya. Seorang penguasa manusia dapat memerintah sebuah imperium dari jarak ribuan kilometer dari rakyatnya.

Hal itu dimungkinkan oleh kemampuan khas manusia untuk menciptakan simbol. Kekuasaan berubah dari kekuatan fisik menjadi lambang: mahkota, takhta, cap, tanda tangan. Justru sifat simbolis inilah yang membuat kekuasaan manusia sekaligus lebih kuat dan lebih rapuh daripada dominasi hewan.

Dari suku menuju negara

Dalam suku pada masa awal, kekuasaan melekat pada pribadi tertentu dan memiliki batas. Kepala suku dapat memutuskan perang atau damai, tetapi tidak dapat memaksa anggota sukunya menyerahkan istri atau anak-anak mereka kepadanya. Wibawanya bertumpu pada kualitas pribadi: kekuatan, kebijaksanaan, dan hubungan dengan roh-roh.

Revolusi pertanian mengubah segalanya. Muncul surplus hasil produksi, kepemilikan pribadi, dan lapisan-lapisan sosial. Kekuasaan tidak lagi menjadi fungsi sementara, melainkan hak istimewa yang diwariskan. Muncullah raja-raja yang memerintah bukan karena paling kuat atau paling bijaksana, melainkan karena lahir dalam keluarga yang tepat.

Mesir kuno memperlihatkan model kekuasaan total pertama dalam sejarah. Firaun bukan sekadar penguasa: ia adalah dewa. Kekuasaannya menjangkau bukan hanya yang hidup, melainkan juga yang mati. Piramida bukan sekadar makam, melainkan perwujudan gagasan tentang kendali mutlak atas ruang dan waktu.

Polis Yunani menawarkan alternatif, yaitu demokrasi. Namun, kekuasaan tidak lenyap di sana. Kekuasaan hanya menjadi milik bersama. Majelis rakyat dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Sokrates semudah seorang tiran menghukum pejabat istana yang tidak disukainya. Demokrasi tidak menghapus kekuasaan: demokrasi membagikannya kembali.

Kekaisaran Romawi memadukan semua bentuk sebelumnya. Kaisar sekaligus menjadi panglima perang, imam tertinggi, perwujudan hukum, dan lambang negara. Kekuasaan Romawi bersifat total, tetapi juga rasional. Kekuasaan itu melahirkan sistem hukum yang masih bekerja hingga hari

ini.

Abad Pertengahan membawa gagasan baru: kekuasaan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Raja memerintah bukan karena ia yang terkuat, melainkan karena ia diurapi oleh Tuhan. Hal ini sekaligus memperkuat keabsahan kekuasaan dan membatasinya. Sang raja harus bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, melainkan juga kepada Yang Mahakuasa.

Zaman modern menjadikan kekuasaan bersifat sekuler. Pencerahan menggantikan hak ilahi dengan kontrak sosial. Kekuasaan menjadi bangunan rasional yang diciptakan manusia untuk menyelesaikan persoalan bersama. Namun, paradoksnya, rasionalisasi kekuasaan tidak memperkecil jangkauannya. Sebaliknya, negara modern mengendalikan kehidupan warga jauh lebih menyeluruh daripada raja mana pun pada Abad Pertengahan.

Kekuasaan sebagai mekanisme bertahan hidup bagi kelompok

Mengapa manusia membentuk hierarki, bahkan ketika hal itu merugikan mereka? Mengapa orang miskin membela sistem yang menindasnya? Mengapa kaum revolusioner, setelah menggulingkan kekuasaan lama, segera membangun kekuasaan baru yang sering kali lebih kejam?

Jawabannya mungkin terletak pada pemahaman bahwa kekuasaan adalah mekanisme bertahan hidup bagi kelompok. Ketika sumber daya terbatas dan ancaman datang dari luar, kelompok tanpa pemimpin akan tercerai-berai. Kekuasaan bukan hanya cara mengeksploitasi, melainkan juga bentuk koordinasi.

Bayangkan sebuah suku yang diserang. Ada dua strategi yang dapat dipilih: setiap orang bertempur sendiri-sendiri, atau semua tunduk pada satu komando. Strategi pertama mungkin berhasil jika musuh lemah. Strategi kedua diperlukan jika musuh kuat. Karena kelompok yang memilih strategi kedua lebih sering bertahan hidup, seleksi alam menanamkan kesiapan untuk tunduk dalam diri kita.

Namun, kesiapan yang sama membuat kita rentan dimanipulasi. Politikus sepanjang zaman menggunakan ancaman nyata maupun khayalan untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri. “Musuh sudah di depan gerbang” adalah cara paling ampuh untuk membuat orang menukar kebebasan dengan keamanan.

Penelitian masa kini menunjukkan bahwa manusia lebih mudah menerima keputusan otoriter ketika mengalami tekanan, ketidakpastian, atau ancaman. Pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa cepatnya masyarakat demokratis menyetujui pembatasan hak-hak dasar atas nama keselamatan bersama.

Namun, adakah alternatif? Dapatkah suatu kelompok bertahan tanpa hierarki? Contoh komunitas anarkis menunjukkan bahwa hal itu mungkin, tetapi hanya dalam kondisi yang sangat khusus: kelompok kecil, tingkat kepercayaan tinggi, dan tidak ada ancaman luar yang serius. Begitu satu saja kondisi itu tidak terpenuhi, kelompok tersebut akan membentuk hierarki atau terpecah.

Bab 2. Landasan sosial kekuasaan

Ketakutan akan kekacauan dan kebutuhan akan keteraturan

“Manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu,” tulis Rousseau. Namun, bagaimana jika belenggu itu bukan rantai yang dipasang orang lain, melainkan pilihan kita

sendiri? Bagaimana jika kitalah yang menciptakan kekuasaan karena takut hidup tanpanya?

Kekacauan bukan sekadar keadaan tidak teratur. Kekacauan adalah keadaan ketika akibat tindakan kita tidak dapat diperkirakan. Di dalamnya tidak ada aturan, dan karena itu tidak ada rasa aman. Siapa pun, kapan pun, dapat menjadi korban atau penyerang. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak dapat merencanakan masa depan, membangun hubungan, atau menciptakan sesuatu yang bertahan lama.

Kekuasaan menawarkan alternatif bagi kekacauan: keteraturan. Keteraturan itu mungkin tidak adil dan membatasi kebebasan, tetapi setidaknya dapat diperkirakan. Di negara dengan kekuasaan yang kuat, seseorang tahu bahwa selama ia mengikuti aturan, besar kemungkinan ia akan tetap hidup dan mempertahankan harta miliknya.

Hobbes menyebut pertukaran kebebasan dengan keamanan ini sebagai kontrak sosial. Orang-orang secara sukarela melepaskan hak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, dengan imbalan jaminan bahwa tindakan orang lain juga akan dibatasi. Kekuasaan menjadi penengah dalam kesepakatan ini.

Namun, apa yang terjadi ketika kekuasaan melanggar bagiannya dalam kesepakatan itu? Ketika ia tidak menjamin keamanan, tetapi terus menuntut kepatuhan? Menurut logika, kesepakatan tersebut semestinya dibatalkan. Kenyataannya justru sebaliknya: orang sering berpegang pada kekuasaan yang tidak berfungsi, karena mereka lebih takut pada kekacauan daripada pada tirani.

Rusia masa kini menjadi contoh yang jelas. Banyak orang Rusia bersikap kritis terhadap penguasa, tetapi tetap memilihnya karena masih mengingat kekacauan tahun 1990-an. “Setidaknya ada keteraturan” menjadi alasan politik utama. Yang luput disadari adalah bahwa kestabilan tanpa perkembangan merupakan kematian yang perlahan.

Keterbatasan sumber daya dan persaingan

Seandainya sumber daya tidak terbatas, apakah kita masih membutuhkan kekuasaan? Dalam dunia yang berlimpah, setiap orang dapat mengambil sebanyak yang diinginkannya tanpa merugikan orang lain. Konflik akan lenyap, begitu pula kebutuhan akan penengah.

Namun, sumber daya selalu terbatas. Selalu. Bahkan dalam masyarakat terkaya sekalipun, tetap ada kelangkaan: waktu, perhatian, status, makna. Di mana ada kelangkaan, di situ muncul persaingan. Dan di mana ada persaingan, di situ timbul kebutuhan akan aturan main serta pihak yang menjaganya.

Kekuasaan adalah cara membagikan sumber daya langka yang telah dilembagakan. Kekuasaan menentukan siapa memperoleh apa, dan atas dasar apa. Dalam masyarakat tradisional, pembagian itu sering didasarkan pada asal-usul: kaum bangsawan memperoleh lebih banyak hanya karena lahir dalam keluarga yang tepat.

Kapitalisme menawarkan prinsip baru, yaitu meritokrasi. Sumber daya seharusnya diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya berkat bakat dan usaha. Namun, dalam praktiknya, meritokrasi sering berubah menjadi bentuk baru hak istimewa turun-temurun. Anak-anak orang kaya memperoleh pendidikan, jaringan, dan peluang awal yang lebih baik. “Kesetaraan kesempatan” tetap menjadi mitos.

Sosialisme berusaha menyelesaikan persoalan ini sampai ke akarnya: menghapus kepemilikan pribadi dan membagikan sumber daya menurut kebutuhan. Namun, siapa yang menentukan kebutuhan itu? Siapa yang memutuskan mana yang lebih penting, membangun pabrik atau rumah sakit? Tak terelakkan, muncul lembaga perencana yang memperoleh kekuasaan sangat besar atas kehidupan manusia.

Ekonomi digital masa kini menciptakan bentuk-bentuk kelangkaan baru. Perhatian menjadi sumber daya utama: dapat diuangkan, diarahkan, dan diperebutkan. Pemilik platform memperoleh kekuasaan bukan karena menguasai tanah atau pabrik, melainkan karena menguasai arus informasi.

Kisah-kisah budaya tentang kekuasaan

Kekuasaan membutuhkan pembenaran. Memaksa saja tidak cukup: orang harus diyakinkan bahwa paksaan itu adil. Setiap zaman menciptakan kisahnya sendiri tentang keabsahan kekuasaan.

Pada zaman kuno, kekuasaan dibenarkan melalui asal-usul ilahi. Firaun adalah putra dewa, kaisar Tiongkok adalah putra langit, dan kaisar Romawi adalah keturunan para dewa. Kisah-kisah ini berhasil karena orang percaya kepada dewa-dewa dan menerima pandangan dunia yang hierarkis.

Kekristenan mengubah kisah itu, tetapi tidak menghapuskannya. Kekuasaan tetap berasal dari Tuhan, tetapi penguasa hanyalah wakil-Nya di bumi. Hal ini sekaligus membuat kekuasaan lebih sah dan lebih bertanggung jawab. Raja harus melayani bukan hanya kepentingannya sendiri, melainkan juga kehendak Yang Mahakuasa.

Pencerahan menjadikan kekuasaan bersifat sekuler. Kini sumbernya bukan Tuhan, melainkan rakyat. Penguasa memperoleh mandat melalui pemilihan atau revolusi. Namun, paradoksnya, kekuasaan demokratis dapat sama totaliternya dengan kekuasaan ilahi. “Kehendak rakyat” adalah sesuatu yang abstrak, sama seperti “kehendak Tuhan”.

Abad ke-20 membawa kisah-kisah baru: ilmiah, teknokratis, dan ideokratis. Kekuasaan tidak lagi dibenarkan dengan tradisi atau kehendak, melainkan dengan pengetahuan. Kaum komunis mengaku mengetahui hukum sejarah. Kaum liberal mengaku mengetahui hukum ekonomi. Kaum teknokrat mengaku mengetahui cara masyarakat bekerja.

Abad ke-21 melahirkan kisah-kisah algoritmis. Kekuasaan beralih kepada mereka yang memiliki data dan mampu mengolahnnya. Kecerdasan buatan mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri; karena itu, ia dapat mengambil keputusan bagi kita. Inilah kisah yang paling menggoda dari semuanya, sebab ia menjanjikan kekuasaan tanpa tanggung jawab.

Bab 3. Psikologi keinginan berkuasa

Menutupi kekosongan batin

“Orang yang haus kekuasaan adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya,” kata seorang bijak. Kalimat ini mengandung lebih banyak kebenaran daripada yang tampak sepintas. Keinginan berkuasa sering berakar bukan pada kekuatan yang berlimpah, melainkan pada kekurangannya.

Bayangkan seseorang yang tidak percaya diri, tidak tahu tempatnya di dunia, dan meragukan nilai dirinya. Kekuasaan menawarkan penyelesaian sederhana bagi semua persoalannya. Begitu memperoleh kendali atas orang lain, ia otomatis menjadi penting. Jika orang patuh kepadanya, tentu dirinya berarti.

Namun, itu hanyalah ilusi. Kekuasaan tidak membentuk jati diri: kekuasaan menutupinya. Di balik jubah penguasa mungkin bersembunyi seorang anak yang tidak percaya diri, yang takut berhadapan sendirian dengan keraguannya. Itulah sebabnya para penguasa begitu erat menggenggam wewenang mereka. Tanpa wewenang itu, mereka berisiko menemukan kekosongan dalam diri sendiri.

Sejarah dipenuhi contoh penguasa yang menutupi rasa rendah diri dengan kebesaran lahiriah. Mungkin Napoleon menaklukkan Eropa untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa tubuhnya yang pendek tidak membuatnya lebih rendah. Mungkin Stalin membinasakan jutaan orang untuk melupakan asal-usulnya dari daerah pinggiran dan kekurangan fisiknya.

Penelitian masa kini mengonfirmasi hipotesis ini. Orang dengan harga diri rendah lebih sering mengejar kedudukan yang memberi mereka kekuasaan atas orang lain. Mereka juga lebih kejam dalam menggunakannya, seolah ingin membuktikan kepada diri sendiri dan dunia bahwa mereka benar-benar kuat.

Namun, upaya menutupi kekurangan itu tidak berhasil. Semakin besar kekuasaan yang diperoleh orang yang tidak percaya diri, semakin kuat kecemasannya. Ia mulai mencurigai semua orang bersekongkol melawannya, melihat ancaman di tempat yang sebenarnya aman, serta mengelilingi diri dengan penjilat dan pengadu. Kekuasaan yang seharusnya memberinya keyakinan justru membuatnya paranoid.

Kekuasaan sebagai penegasan diri

Dorongan lain untuk mengejar kekuasaan adalah kebutuhan akan pengakuan. Manusia ingin merasa berarti, dibutuhkan, dan penting. Dalam masyarakat tradisional, hal ini dicapai melalui kemahiran, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada komunitas. Di dunia masa kini, jalan-jalan itu telah kehilangan gengsi.

Kekuasaan tetap menjadi salah satu dari sedikit jalan untuk memperoleh pengakuan masyarakat. Politikus di layar televisi, direktur utama di sampul majalah, penulis blog dengan jutaan pengikut: mereka semua memperoleh apa yang didambakan setiap manusia, yaitu perhatian dan rasa hormat.

Namun, pengakuan itu semu. Orang menghormati bukan pribadi sang penguasa, melainkan kedudukannya. Begitu kekuasaan itu hilang, rasa hormat pun menguap. Mereka yang kemarin menjilat, besok akan mengejek. Para mantan presiden mengenal hal ini dari pengalaman sendiri.

Lebih dari itu, kekuasaan sering merusak kualitas yang sebenarnya dapat mendatangkan penghormatan tulus. Sang penguasa berhenti berkembang karena orang-orang di sekitarnya takut mengkritiknya. Ia kehilangan hubungan dengan kenyataan karena hidup dalam dunia informasi yang dikendalikan. Ia kehilangan kemampuan menjalin hubungan yang tulus, karena tidak tahu siapa yang berteman demi kepentingan dan siapa yang berteman karena keyakinan.

Yang paling tragis adalah ketika orang-orang dengan kualitas sungguh luar biasa memperoleh kekuasaan. Kekuasaan tidak memperkuat bakat mereka, melainkan menghancurkannya. Ilmuwan jenius yang menjadi menteri berhenti menekuni ilmu pengetahuan. Penulis berbakat yang menduduki jabatan politik kehilangan daya ciptanya.

Ilusi kendali dan makna

Mungkin alasan terdalam manusia mengejar kekuasaan adalah kecemasan eksistensial. Manusia adalah satu-satunya hewan yang menyadari bahwa dirinya akan mati. Pengetahuan ini menimbulkan ketakutan, yang berusaha ia atasi dengan berbagai cara.

Salah satunya adalah ilusi kendali. Jika aku dapat mengatur orang lain, berarti aku tidak tak berdaya di hadapan takdir. Jika hidup jutaan orang bergantung pada keputusanku, berarti hidupku sendiri memiliki makna.

Kekuasaan menawarkan kesempatan yang khas untuk merasa sebagai penguasa dunia. Seorang pemimpin dapat menetapkan undang-undang, lalu jutaan orang mengubah perilakunya. Ia dapat menyatakan perang, lalu sejarah berbelok ke arah baru. Ia dapat mendirikan monumen, lalu namanya bertahan selama berabad-abad.

Namun, ilusi ini pun menipu. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin jelas ia melihat batas-batasnya. Ia dapat mengatur manusia, tetapi tidak dapat mengatur waktu. Ia dapat mengubah hukum, tetapi tidak dapat mengubah kematian. Ia dapat masuk ke dalam sejarah, tetapi tidak dapat menghindari batas hidupnya sendiri.

Lebih dari itu, kekuasaan sering merampas makna hidup, bukan memberikannya. Sang penguasa menjadi tawanan kedudukannya. Ia tidak dapat membiarkan dirinya tampil apa adanya, tulus, dan rentan. Ia harus terus memainkan peran, mengenakan topeng, dan menyesuaikan diri dengan citra tertentu.

Akibatnya, orang yang mengejar kekuasaan demi menemukan makna justru mendapati bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Sesuatu yang seharusnya menjadi sarana mewujudkan potensi diri berubah menjadi penjara. Kekuasaan yang tampak seperti pembebasan ternyata menjadi bentuk perbudakan yang baru.

Inilah yang menjelaskan mengapa banyak penguasa merasakan kekecewaan mendalam pada akhir hidupnya. Mereka meraih semua yang dikejar, tetapi tidak memperoleh apa yang dicari. Mereka ingin menjadi dewa, tetapi hanya menjadi fungsi. Mereka memimpikan keabadian, tetapi hanya mendapat pengingat yang lebih halus bahwa mereka tetap akan mati.

BAGIAN II. MEKANISME DAN PATOLOGI

Bab 4. Mengapa manusia menginginkan kekuasaan: renungan filosofis

Hasrat akan kekuasaan adalah salah satu dorongan manusia yang paling tua dan paling bertahan lama. Akarnya menembus sejarah sekaligus biologi: naluri untuk mendominasi, membangun hierarki, dan menguasai sumber daya membuat kekuasaan diinginkan, bahkan dianggap perlu oleh banyak orang. Dalam sejarah, hasrat itu menjelma dalam sosok pahlawan, kepala suku, dan raja. Di sekeliling mereka, manusia membangun bukan hanya negara, melainkan juga seluruh tatanan nilai.

Namun, betapapun kuatnya dorongan itu, keadaan sosial berulang kali menuntut kita memikirkan kembali alasan di balik kekuasaan. Sumber daya yang terbatas, persaingan, dan ketakutan akan kekacauan menimbulkan kebutuhan untuk membenarkannya: mengapa kekuasaan ini, mengapa sekarang, dan mengapa dengan cara seperti ini? Di sinilah kebudayaan dan pendidikan paling kuat berperan. Keduanya membentuk pandangan bahwa kekuasaan adalah tujuan, kedudukan yang bisa diraih, dan lambang keberhasilan. Alasan-alasan ini mengendap dalam mitos, diwariskan dari orang tua kepada anak, dan menjadi bagian dari pengasuhan.

Meski begitu, sebuah pertanyaan muncul: bagaimana jika sepanjang sejarah manusia tidak pernah ada keharusan untuk mengejar kekuasaan? Bayangkan dunia yang tatanan sosialnya tidak mengenal hierarki, tempat hubungan yang setara menggantikan hubungan bertingkat. Kehidupan di sana akan sangat berbeda—mungkin lebih lentur, mungkin lebih kacau, tetapi pasti bukan kehidupan yang kita kenal. Pandangan kita tentang legitimasi pun akan berubah sama mendasarnya. Jika kekuasaan tidak memerlukan alasan atau penjelasan, ia mungkin dianggap wajar, atau justru tidak masuk akal.

Di sinilah alasan menjadi sesuatu yang menjaga kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Kita ingin percaya bahwa kekuasaan memiliki dasar, bahwa ia bukan kebetulan, keinginan sesaat, atau kekeliruan. Kepercayaan ini memberi rasa bahwa hidup dapat diperkirakan, bahwa ada keteguhan moral dan sesuatu yang bisa dipercaya. Tanpanya, kekuasaan tampak sebagai tirani atau kekacauan, bergantung pada siapa yang memandang.

Tetapi bagaimana jika alasan itu sendiri hanyalah pembenaran yang dibuat belakangan? Jika demikian, alasan tidak mendahului kekuasaan, melainkan menyertainya seperti hiasan atau selubung. Kesadaran ini mengguncang rasa keadilan: bila alasannya ilusi, kekuasaan pun mungkin merupakan penipuan terhadap diri sendiri.

Alasan sering dipakai untuk membenarkan keunggulan moral. Ia bukan sekadar penjelasan logis, melainkan klaim atas kebenaran dan hak untuk menentukan yang baik dan yang buruk. Retorika politik berdiri di atas dasar ini: “Kami berhak karena...” Dalam kalimat semacam itu tersimpan daya yang membuat kekuasaan bertahan, dapat diwariskan, dan dianggap sah. Namun, terkadang semuanya hanya selubung yang menyembunyikan kekuatan kasar, kendali, dan paksaan. Ketika selubung itu menjadi tembus pandang, kekuasaan kehilangan daya magisnya dan tinggal sebagai mekanisme belaka.

Jika kekuasaan sama sekali tidak memiliki pembenaran, bahkan dalam bentuk mitos, ia akan kosong. Orang hanya akan patuh karena takut atau terbawa kebiasaan. Selama masih ada suatu alasan, betapapun diperdebatkan, kekuasaan dapat terus hidup. Namun, di sinilah risikonya: ketika alasan kehilangan isi, kekuasaan berubah menjadi manipulasi. Yang menopangnya bukan lagi keyakinan, melainkan ketidakberdayaan.

Sebagian peneliti menganggap ketakutan sebagai alasan paling mendasar di balik keinginan berkuasa. Ketakutan akan anarki, kekacauan, dan ketiadaan batas mendorong manusia untuk tunduk. Kekuasaan menjanjikan keamanan dan kestabilan, bahkan bila harga kestabilan itu adalah kebebasan yang dibatasi. Motif lain juga berperan, misalnya iri hati, karisma, atau keinginan untuk menegaskan diri. Kadang kekuasaan hanyalah sarana melindungi diri. Kadang ia menjadi cara meredakan kegelisahan batin.

Bayangkan kekuasaan lahir dari cinta, bukan dari rasa takut. Dalam masyarakat semacam itu, memimpin berarti merawat, bukan mendominasi. Kekuasaan berarti melayani, bukan menguasai orang lain. Mungkinkah? Secara teori, ya. Dalam kenyataan, bentuk kekuasaan seperti ini langka dan rapuh. Hasrat berkuasa yang berakar pada cinta harus ditopang oleh masyarakat, bukan hanya oleh orang yang memegang kekuasaan.

Jika kekuasaan lahir dari protes, ia tidak akan menjaga keadaan yang ada, melainkan berusaha meruntuhkannya. Kekuasaan itu sendiri menjadi ungkapan dorongan revolusioner, pembaruan yang terus-menerus, dan penolakan terhadap hierarki yang mapan. Dalam keadaan ini, ia kehilangan fungsi penyeimbangannya dan berubah menjadi alat perubahan, tetapi sekaligus sumber ketidakstabilan.

Namun, dalam kenyataan kita menemui sebuah paradoks: semakin besar kekuasaan yang diraih seseorang, semakin sering ia kehilangan dirinya sendiri. Krisis eksistensial yang muncul ketika kendali telah diperoleh menyingkap kekosongan batin. Ternyata kekuasaan tidak serta-merta mengisi hidup dengan makna; ia mampu menghancurkannya. Pada saat itu, kekuasaan terasa bukan sebagai puncak, melainkan jurang.

Bab 5. Hilangnya makna kekuasaan dan parodi budaya

Perasaan bahwa kekuasaan tidak bermakna bisa lahir dari krisis pribadi, tetapi juga dari masalah dalam sistem: reformasi yang gagal, korupsi, dan kelelahan ideologis. Ketika kekuasaan tidak membuahkan hasil, ia tampak tidak berguna, seperti sebuah sandiwara. Orang kehilangan kepercayaan, menjauh, dan enggan ikut dalam kehidupan politik. Kekuasaan menjadi bahan lelucon—sebuah dagelan, bukan alat untuk bertindak.

Bayangkan sebuah masyarakat tempat kekuasaan selalu tampak penuh makna. Barangkali di sana tidak akan lahir filsafat keraguan, tidak pula pencarian bentuk pemerintahan lain. Padahal, justru keraguan itulah yang menggerakkan perkembangan pemikiran dan masyarakat. Darinya lahir kritik, protes, dan peninjauan kembali.

Jika ketiadaan makna dalam kekuasaan justru membangunkan orang alih-alih membuat mereka apatis, akan muncul hubungan baru dengan kekuasaan. Orang menimbang kembali keterlibatan mereka, mencari cara untuk ikut serta, dan menuntut pertanggungjawaban. Namun, hal ini juga sering mengarah pada radikalisasi. Seseorang yang mencari makna melalui kekuasaan berisiko terperangkap dalam penipuan diri, menjadikan kekuasaan pengisi kekosongan batin.

Orang seperti itu bisa percaya bahwa hanya kekuasaan yang akan membuat dirinya berarti. Ketidadaan makna tidak teratasi; ia hanya disamarkan oleh gelar, pengaruh, dan bawahan. Di balik semua itu sering bersembunyi kegelisahan: “Bagaimana jika semuanya tidak berarti apa-apa?” Kegelisahan ini dapat merusak seluruh bangunan dari dalam. Kekuasaan pun kehilangan keseimbangan, dan krisis legitimasi dimulai.

Kadang hal ini muncul dalam bentuk parodi budaya: kekuasaan menjadi sasaran ejekan dan satire. Ritual yang dulu terasa penting menjadi hampa. Jika tujuan kekuasaan tidak sesuai dengan hasilnya, dasarnya mulai runtuh. Orang berhenti percaya pada janji, dan kekuasaan kehilangan masa depan.

Di sini muncul persoalan penting lainnya: dasar kekuasaan. Tanpa dasar, ia berubah menjadi kekerasan. Dalam sebagian kebudayaan, kekuasaan sekadar “ada”, seperti gejala alam. Ia tidak

memerlukan penjelasan. Dalam lingkungan lain, terutama yang demokratis, kekuasaan tanpa dasar dipandang sebagai ancaman.

Karena itulah lahir kisah tentang hak ilahi, tradisi, atau perjanjian antara rakyat dan penguasa. Dasar-dasar ini memberi kekuasaan legitimasi. Aturan hukum membakukannya, kebudayaan melindunginya, dan pendidikan menjelaskannya. Semua itu menciptakan rasa keadilan. Orang merasa tunduk pada sesuatu yang masuk akal, bukan pada kesewenang-wenangan.

Tetapi bagaimana jika dasar itu hanya tabir asap? Bagaimana jika ia tidak mencerminkan kenyataan, melainkan menutupinya? Kekuasaan pun menjadi manipulasi. Terlebih bila pbenarannya terlalu sering berganti: dari agama ke kemajuan, dari kemajuan ke keamanan, dari keamanan ke kelangsungan hidup. Pencarian dasar baru yang tidak kunjung berhenti ini mengikis kepercayaan. Kekuasaan kehilangan kestabilannya.

Ketika dasarnya kabur, perebutan tafsir dimulai. Sebagian mengatakan kekuasaan melindungi, sebagian lain mengatakan ia mengancam. Dalam pertarungan ini, yang menang bukan yang benar, melainkan yang paling lantang. Begitulah lembaga-lembaga runtuh, populisme tumbuh, dan kesepakatan bersama menghilang.

Jika karisma menggantikan dasar yang kuat, kekuasaan bergantung pada satu pribadi. Ini berbahaya: karisma ikut mati bersama pemiliknya, sementara kesinambungan belum tentu terjamin. Kekuasaan berubah menjadi pertunjukan. Ketika pertunjukan usai, manusia tinggal sendirian menghadapi kekosongan.

Kadang dasarnya hanya kebiasaan. “Sejak dulu memang begitu.” Di situlah kekuatan tradisi, tetapi juga kelemahannya: ia tidak memberi ruang bagi pembaruan. Kekuasaan membeku seperti tubuh yang dimumikan. Ia masih ada, tetapi tidak lagi hidup.

Meski demikian, serapuh apa pun, keberadaan suatu dasar menguatkan rasa keadilan. Jika orang memahami dan menerima alasan kekuasaan itu ada, mereka akan menerimanya bahkan pada masa sulit. Tanpa itu, yang tersisa hanya rasa takut. Atau ketidakpedulian. Atau pemberontakan.

Bab 6. Anatomi kekuasaan: dari naluri menuju ilusi

Kekuasaan sebagai paradoks yang tak terelakkan

Kekuasaan adalah paradoks masyarakat manusia yang tak terelakkan, tetapi tragis. Ia muncul sebagai alat rasional untuk mengatasi kekacauan dan menjamin kelangsungan hidup, tetapi mau tidak mau melahirkan patologi irasionalnya sendiri: keterasingan, kendali total, dan kekosongan eksistensial. Pada gilirannya, hal ini membuat manusia terus mencari kebebasan dari kekuasaan melalui penolakan serta penciptaan bentuk-bentuk organisasi alternatif. Namun, alternatif itu sendiri selalu berisiko berubah menjadi hierarki baru yang lebih canggih.

Godaan yang tak terelakkan

Buku ini membahas godaan paling kuat dan paling berbahaya yang dikenal manusia: kekuasaan. Kita mengejanya, memperjuangkannya, menderita karenanya, menggulingkannya, lalu... menciptakannya kembali dalam bentuk baru. Kekuasaan bagaikan api: dapat menghangatkan dan menerangi, tetapi juga dapat membakar segalanya hingga menjadi abu.

Mengapa kekuasaan memiliki daya tarik begitu besar? Dan mengapa, setelah meraihnya, manusia sering hanya menemukan kekecewaan dan kekosongan? Buku ini mencoba menempuh perjalanan menuju akar kekuasaan. Kita mulai dari kedalaman biologis kita yang gelap dan sarat naluri, tempat lahirnya keinginan untuk mendominasi. Lalu kita akan melihat bagaimana ketakutan akan kekacauan membuat manusia secara sukarela menciptakan kekuatan di atas dirinya, yang sanggup mengekanginya. Kita akan menelaah kisah-kisah besar dan ilusi—dari hak ilahi hingga kedaulatan rakyat—yang menjadikan kekuasaan bukan sekadar kekuatan, melainkan hak yang sah.

Namun, perjalanan kita tidak berhenti di sana. Kita akan mengintip ke balik wajah megah kekuasaan dan melihat patologinya: krisis eksistensial sang penguasa, obsesi terhadap kendali total, serta ritual tanpa makna yang menyedihkan. Akhirnya, kita akan menelusuri jalan pembebasan, dari penolakan pribadi yang senyap hingga percobaan berani untuk membangun masyarakat yang bebas dari hierarki dan paksaan.

Ini adalah perjalanan dari naluri menuju ilusi dan kembali lagi. Tujuannya bukan memberi jawaban akhir, melainkan mengajukan pertanyaan yang tepat. Memahami anatomi kekuasaan adalah langkah pertama agar kita tidak menjadi budaknya.

BAGIAN III. ALTERNATIF DAN PERLAWANAN

Bab 7. Filsafat penolakan: dari kaum Stoa hingga jeda digital

Ketika sistem kekuasaan menjadi total, menindas, atau tanpa makna, tindakan perlawanan yang paling awal dan paling pribadi adalah penolakan. Penolakan tidak selalu berupa pemberontakan riuh dengan bendera berkibar di atas barikade. Lebih sering ia berupa gerak batin yang hening, keputusan untuk mengatakan “tidak” terhadap sesuatu yang diterima orang lain sebagai hal yang sudah semestinya. Menolak adalah cara merebut kembali kedaulatan atas hidup sendiri, menarik batas di tempat sistem berusaha menghapusnya.

Kaum Stoa dan kaum Kinik

Para filsuf zaman kuno adalah yang pertama menyadari kekuatan penolakan sebagai cara menjalani hidup. Dalam dunia yang dipenuhi tiran, perang, dan permainan takdir, mereka mencari cara mempertahankan kebebasan batin serta ketenteraman jiwa.

Kaum Stoa—Seneca, Epiktetos, dan Marcus Aurelius—mengajukan rumusan cemerlang: segala hal harus dibedakan antara yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, penilaian, dan reaksi kita. Selebihnya—tubuh, kesehatan, kekayaan, nama baik, dan tindakan orang lain—tidak bergantung pada kita. Menurut kaum Stoa, orang bijak harus memusatkan perhatian sepenuhnya pada hal yang dapat ia kendalikan, dan menghadapi segala sesuatu di luar dirinya dengan ketidakpedulian penuh, atau *apatheia*.

Kaum Kinik melangkah lebih jauh. Penolakan mereka bukan hanya berlangsung dalam batin, melainkan juga ditunjukkan secara terbuka. Tokohnya yang paling terkenal, Diogenes dari Sinope, tinggal dalam tempayan tanah liat besar, yang disebut *pithos*, serta memandang rendah segala kebiasaan sosial dan kekayaan. Pertemuannya yang termasyhur dengan Aleksander Agung merangkum inti penolakan itu. Ketika sang penakluk berkata, “Mintalah apa pun yang kau inginkan,” sang filsuf menjawab, “Jangan halangi sinar matahariku.”

Asketisme dan kehidupan menyepi

Hampir semua agama dunia mengenal tradisi asketisme: dengan sadar melepaskan harta duniawi, kesenangan, dan ikatan sosial demi pencerahan rohani. Para biarawan, pertapa, dan orang suci melakukan penolakan radikal terhadap nilai-nilai dunia ini—kekuasaan, kekayaan, kemasyhuran—demi nilai-nilai dunia lain: keselamatan jiwa, nirwana, dan kesatuan dengan Tuhan.

Penolakan politik dan pembangkangan

Pada abad ke-20, penolakan menjadi alat politik yang kuat. Mahatma Gandhi mengubah perlawanan pasif dan pembangkangan sipil menjadi strategi yang akhirnya membawa India menuju kemerdekaan. Gagasannya tentang satyagraha, “keteguhan dalam kebenaran”, adalah penolakan untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang tidak adil.

Bentuk-bentuk penolakan masa kini

Dalam masyarakat pascaindustri, bentuk utama kendali bukan lagi kekerasan fisik, melainkan perlombaan konsumsi dan luapan informasi. Di dalamnya muncul bentuk-bentuk penolakan yang baru:

- Memilih hidup yang lebih sederhana—meninggalkan karier bergaji tinggi tetapi penuh tekanan
- Minimalisme—dengan sadar menolak konsumsi berlebihan
- Jeda digital—menolak untuk terus-menerus berada di dunia daring

Bab 8. Alternatif yang setara: mencari masyarakat baru

Penolakan membebaskan individu, tetapi membiarkannya sendirian berhadapan dengan sistem. Langkah berikutnya yang masuk akal adalah menyatukan mereka yang telah mengatakan “tidak” dalam bentuk-bentuk komunitas baru. Komunitas itu dibangun di atas prinsip-prinsip lain, sebagai alternatif bagi kekuasaan, hierarki, dan paksaan.

Anarkisme sebagai alternatif

Alternatif yang paling konsisten dan radikal terhadap kekuasaan adalah anarkisme. Berlawanan dengan anggapan umum, anarki bukan kekacauan, melainkan sistem pengorganisasian diri yang kompleks, berlandaskan kerja sama sukarela, saling membantu, dan ketiadaan paksaan.

Selama Perang Saudara Spanyol (1936-1939), wilayah-wilayah luas di Catalunya dan Aragon berada di bawah kendali kaum anarko-sindikalis. Pabrik serta tanah menjadi milik bersama dan dikelola komite buruh serta petani. Uang dihapuskan, sementara keputusan dibuat melalui rapat umum.

Percobaan masa kini

- Permukiman ekologis dan komune—ribuan komunitas kecil yang mencoba mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama
- Gerakan Zapatista di Meksiko—wilayah pemerintahan otonom yang hidup dengan prinsip mandar obedeciendo, “memerintah dengan mematuhi”

- DAO, organisasi otonom terdesentralisasi—upaya membangun sistem pengelolaan yang sepenuhnya transparan dan demokratis dengan teknologi blockchain

Paradoks ketiadaan struktur

Semua percobaan ini berhadapan dengan paradoks mendasar. Dalam esainya “Tirani Ketidadaan Struktur”, feminis Amerika Jo Freeman menunjukkan bahwa menolak struktur formal tidak menghasilkan kesetaraan. Sebaliknya, kekuasaan menjadi tak terlihat dan informal.

PENUTUP: KENISCAYAAN ATAU PILIHAN?

Kita memulai perjalanan ini dengan pertanyaan sederhana: mengapa manusia menginginkan kekuasaan? Kita menemukan bahwa akarnya tertanam dalam biologi kita, dalam ketakutan purba akan kekacauan, dan dalam keinginan abadi akan keteraturan. Kekuasaan bukan kebetulan ganjil dalam sejarah, melainkan jawaban mendasar terhadap tantangan keberadaan manusia.

Namun, seperti yang telah kita lihat, jawaban ini melahirkan pertanyaan baru yang lebih rumit. Alat yang diciptakan untuk melindungi berubah menjadi mekanisme kendali. Struktur yang seharusnya memberi makna pada hidup justru menjerumuskan kita ke dalam kekosongan eksistensial. Kita telah menelusuri perubahan kekuasaan, dari kepala suku yang menjadi perwujudannya hingga algoritme tanpa wajah, tetapi tragedi batinnya tetap sama.

Menghadapi tragedi ini, manusia selalu mencari jalan pembebasan. Kita telah melihat kekuatan penolakan individu, dari kaum Stoa yang menarik diri ke dalam batin hingga jeda digital masa kini. Kita telah menelaah percobaan-percobaan berani untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarki, dari komune anarkis hingga jaringan terdesentralisasi.

Di sini kita kembali pada paradoks utama. Bukankah setiap penolakan atau alternatif mungkin hanya menjadi benih bentuk kekuasaan baru yang lebih halus dan rumit? Bukankah manifesto revolusioner hari ini dapat berubah menjadi doktrin negara esok hari, dan komunitas yang setara menjadi birokrasi baru?

Buku ini tidak memberi jawaban akhir atas pertanyaan tersebut. Mungkin jawaban itu memang tidak ada. Namun, buku ini menawarkan beberapa kesimpulan penting:

- Kesadaran sebagai perlindungan: memahami hakikat dan patologi kekuasaan adalah vaksin pertama dan terpenting terhadap penyalahgunaannya.
- Nilai sebuah alternatif: sekalipun utopia tak dapat dicapai, keberadaannya sebagai gagasan dan percobaan sudah mencegah sistem dominan menjadi kaku dan membeku.
- Kekuasaan masa depan: masa depan kekuasaan mungkin akan ditentukan oleh kemampuannya membatasi diri dan menyatu dengan sistem-sistem nonhierarkis.

Dengan demikian, sejarah kekuasaan bukanlah proses yang bergerak lurus, melainkan siklus abadi pertarungan antara naluri mendominasi dan kerinduan akan kebebasan. Mungkin tugas sejati manusia bukan memenangkan pertarungan ini untuk selamanya, melainkan belajar hidup bersama pertentangan yang tak terselesaikan ini, sambil mempertahankan martabat dan hak untuk memilih.

DAFTAR PUSTAKA

[Daftar sumber bacaan yang digunakan seharusnya dicantumkan di sini]

INDEKS SUBJEK

[Indeks alfabetis istilah utama dan nama seharusnya dicantumkan di sini]